

Itulah kekejian VOC, kolonialis pertama yang menjajah Indonesia. Di tahun 2014, 69 tahun setelah Indonesia merdeka, kolonialisme yang telah berubah wajah tadi masih terus bercokol menjajah negeri ini, kali ini atas dukungan para pemimpin kita sendiri. Tidak dengan membunuh, memperkosa secara fisik, dan merampok paksa kita, tetapi dengan menipu, memperdayai dan “meracuni” akal pikiran kita sehingga “penjajahan” yang penuh kejahatan itu menjadi sesuatu yang (seolah) kita sendiri yang membutuhkannya. Kini, VOC baru itu berganti nama menjadi **IMF** dan **Bank Dunia**, bahkan juga **WHO** serigala berbulu domba yang bekerja lebih canggih membunuh jutaan umat manusia atas nama “pengabdian” pada dunia. Berikut ini kisah bagaimana **WHO** badan dunia yang di sekolah-sekolah dimitoskan “sangat terhormat” itu terkadang bisa menjadi pencuri dan “pembunuh” yang licik dan berdarah dingin bagi umat manusia. Begini ceritanya. Amerika Serikat, dengan kedok misi kemanusiaan NAMRU AL melalui WHO meminta Indonesia (melalui Depkes) agar mengirim “virus” flu burung, dengan alasan untuk diteliti dan dicarikan obat pencegahnya. Seterusnya, melalui perjanjian yang dibuat secara sepihak mereka mendirikan *base camp* NAMRU di halaman Depkes RI, dan Indonesia sejak 1970 berdasarkan “jebakan” ini telah mengirim lebih dari 58 virus. Tapi, apa yang terjadi?

“Sampel virus yang kita kirim ke laboratorium rujukan WHO, yaitu NAMRU di Hong Kong, ternyata diam-diam dijual ke perusahaan-perusahaan farmasi pembuat vaksin di negara maju seharga Rp 90 triliun per virus. Padahal, Indonesia sudah mengirim 58 virus. Jika seluruh virus dijual maka uang yang dikeruk dari penjualan virus milik kita sebesar Rp 5.220 triliun. Angka yang sangat fantastis.”

Menteri Kesehatan, Siti Fadila,
dalam buku kesaksiannya mengenai kecurangan WHO,
Saatnya Dunia Berubah

Lima ribu dua ratus dua puluh triliun rupiah. Bayangkan betapa fantastisnya! Jika uang sebesar itu digunakan untuk mendidik rakyat dan mengentaskan kemiskinan, betapa hebatnya NKRI? Bandingkan. Depdiknas adalah departemen penerima alokasi APBN terbesar dibanding departemen lain, itu pun hanya **Rp 55 triliun**. Untuk mengentaskan kemiskinan di 25 provinsi (2010) kita hanya punya anggaran **Rp 80 triliun**.

VIVAnews - Untuk mengentaskan kemiskinan pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 49,5 triliun pada 2011. Anggaran tersebut tersebar di setiap kementerian/lembaga yang memiliki program pengentasan kemiskinan.

Deputi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan dan UKM Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Prastijono Widjodjo mengatakan, dana sebesar itu belum termasuk subsidi dan dana bantuan lain. "Ini khusus bagi K/L yang mempunyai program pengentasan kemiskinan," kata Prastijono di kantornya, Jakarta, Rabu 20 Oktober 2010.

Pada 2010 ini, anggaran pengentasan kemiskinan mencapai Rp 70 - 80 triliun, angka tersebut sudah termasuk subsidi kepada masyarakat. Anggaran tersebut berhasil menurunkan jumlah kemiskinan dari 14,15 persen pada 2009 menjadi 13,3 pada 2010.

Pengentasan kemiskinan memang menjadi program prioritas pemerintah. Jumlah orang miskin dan mendekati miskin per Maret 2010 mencapai 60 juta orang. Hal ini menunjukkan penanggulangan kemiskinan bukan hanya masalah pemerintah, namun membutuhkan bantuan dari masyarakat.

Dari Rp 49,5 triliun, Rp 13,1 triliun di antaranya untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) untuk 6.623 kecamatan. PNPM itu terdiri dari PNPM Perkotaan sebesar Rp 1,67 triliun untuk 1.153 kecamatan dan pedesaan sebesar Rp 9,58 triliun untuk 5.016 kecamatan.

Sedangkan sisanya untuk PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 237 kecamatan sebesar Rp 5,27 triliun, PNPM *Rural Infrastructure Support* (RIS) di 215 kecamatan sebesar

Rp 1,01 triliun, dan PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) di 75 kabupaten/kota sebesar Rp 345,9 miliar.

Dengan dana sebesar itu, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana berharap indikator kemiskinan pada RPJMN 2011 sebesar 11,5-12,5 persen dapat tercapai. **“Kalau betul-betul mau menanggulangi kemiskinan, maka setiap kementerian harus *all out*,”** katanya.

Bangsa Indonesia, selain kaya di daratan juga dianugerahi kekayaan isi lautan (sesuai statusnya sebagai bangsa bahari, sayangnya kita pun terjajah di sektor kelautan ini).

Nelayan kita hidup miskin dan terpuruk.

Luas laut Indonesia 5,8 juta km² atau $\frac{2}{3}$ luas wilayah RI dan panjang pantai 95.181 km, tapi sumbangan penghasilan dari perikanan terhadap PDB baru 2,2%.

Nelayan kita sebagai akibat tak terurus hanya bisa mengais di pinggiran pantai, mengurus ikan-ikan yang tak ada harganya. Lautannya tercemar, sementara ikan-ikan yang di Jepang berharga Rp 1 miliar per ekor (ikan tuna biru) jadi santapan pemodal asing.

Departemen Perikanan hanya hobi memberitakan kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) yang angkanya hanya Rp 30 triliun/tahun. Sementara ilegal lisensi⁵ yang lebih besar lagi Rp 253 triliun per tahun tak pernah disinggung. Padahal rakyat berhak tahu ini. Kita juga jadi korban “jajahan” asing di bidang kemandirian ekonomi.

Karena telah memutuskan membangun dengan anggaran “hutang” maka NKRI terperangkap dalam belukar “ranjau hutang” yang tak berkesudahan. Ini terjadi terutama sejak Orde Baru berkuasa yang melahirkan penipuan yang membodohkan rakyat dengan eufemisme, menyulap bahasa hutang yang secara susila awam “tabu” menjadi bantuan sehingga

⁵ Ilegal lisensi adalah pemberian izin secara ilegal yang dilakukan oleh pihak pemberi dan penerima lisensi.

menghapus ancaman risiko di belakang hari untuk membayar hutang tersebut. Hutang yang tadinya menggendong “rasa tak berharga” berbalik menjadi kebanggaan setiap kali mendapat “bantuan” sehingga ketika Soeharto runtuh rakyat dikejutkan oleh hitungan statistik bahwa Indonesia ternyata adalah negara besar yang rezim pemerintahnya telah menyebabkan setiap bayi yang baru dilahirkan di bumi Indonesia yang *gemah ripah loh jinawi* untuk menanggung hutang sebesar Rp 8.114.000 dari total **2.036 triliun**⁶ yang dihutang Orde Baru dan dilanjutkan oleh SBY. Inilah alasannya:

Presiden SBY berada di penghujung kekuasaannya. Sebab, tahun depan Indonesia akan memiliki pemimpin baru yang dipilih dalam pemilihan presiden (pilpres).

Namun, di penghujung pemerintahannya, hutang luar negeri Indonesia ternyata malah semakin meningkat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), hutang Indonesia per Mei 2013 sudah mencapai 2.036 triliun.

Jumlah itu bertambah Rp 186 triliun hanya dalam kurun waktu enam bulan. “Hasil LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) yang diterbitkan oleh BPK tahun 2012, di mana pada akhir bulan Desember 2012, hutang RI baru mencapai Rp 1.850 triliun,” kata Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Ucock Sky Khadafi, dalam rilis yang diterima merdeka.com, Rabu (17/7).

Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pertumbuhan penduduk Indonesia per tahunnya adalah 1,49 persen. Pada 2013 ini jumlah penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah 250 juta orang.

“Bertambahnya jumlah penduduk tersebut disebabkan masih tingginya tingkat fertilitas,” kata Kepala BKKBN Fasli Jalal pada pembukaan *Parenting Education* dalam Rangka Hari Anak Nasional Tahun 2013, Rabu (17/7) di Auditorium BKKBN, Jakarta Timur.

⁶ Prof. Dr. Sumitro Djyohadikusomo pernah mengatakan bahwa 30% dari dana hutangan ini bocor oleh korupsi Soeharto dan kroninya yang menyebabkan Soeharto “pecah kongsi” dengan besarnya yang telah berjasa mengawal dirinya.

Artinya, dengan jumlah hutang luar negeri yang dimiliki Indonesia saat ini, tiap penduduk dan bayi yang baru dilahirkan ke bumi Indonesia secara otomatis langsung terbebani hutang negara sebesar Rp 8.114.000. Jumlah itu diperoleh dari Rp 2.036 triliun dibagi Rp 250 juta penduduk.

Tak hanya itu, besarnya jumlah hutang yang dimiliki saat ini menandakan Indonesia tengah menuju menjadi negara bangkrut. Sebab, tanda-tanda menjadi negara bangkrut antara lain adalah hutang pemerintah terus menumpuk, aset negara atau tanah beserta sumber daya alam lainnya sudah dikuasai oleh pihak swasta, cadangan devisa yang terus tergerus dan merosot ke titik nol, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan luar biasa, dan pemerintah tidak mampu lagi membayar gaji aparat negara.

“Lihat saja sekarang, di mana pada akhir bulan Desember masih USD 112,8 miliar, dan pada akhir bulan Juni sudah tergerus menjadi USD 98,1 miliar,” kata Ucok.

Menurut Ucok, hutang luar negeri Indonesia semakin membengkak akibat pinjaman yang dilakukan oleh 16 kementerian, lembaga maupun BUMN, untuk menggarap proyek pembangunan. Meski proyek sudah berjalan, rupanya pengembalian hutang belum sepenuhnya selesai.

16 kementerian itu antara lain: Kementerian Keuangan (USD 871,1 juta atau Rp 8,3 triliun), Kementerian Negara PPN/BAPPENAS (USD 302 juta atau Rp 2,8 triliun), Kementerian Pertahanan (USD 227,1 juta atau Rp 2,1 triliun), Kementerian Pekerjaan Umum (USD 165,5 juta atau Rp 1,5 triliun), PT PLN (USD 59 juta atau Rp 567,2 miliar), Kementerian Perhubungan (USD 45,6 juta atau Rp 438,6 miliar), (Kementerian Dalam Negeri (USD 21,2 juta atau Rp 204,1 miliar), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (USD 8,9 juta atau Rp 86,1 miliar).

Sementara, Kementerian Kesehatan menghabiskan hutang luar negeri sebesar USD 8,4 juta atau Rp 81,1 miliar, Badan Meteorologi dan Geofisika (USD 7,6 juta atau Rp 72,9 miliar), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (USD 1,6 juta atau Rp 15,7 miliar), Kementerian Komunikasi dan Informatika (USD 984,4 ribu atau Rp 9,4 miliar), Kementerian Pertanian (USD 912,8 ribu atau Rp 8,7 miliar), PT Pertamina (USD 353,7 ribu atau Rp 3,3

miliar), Kementerian Agama (USD 262,2 ribu atau Rp 2,5 miliar), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (USD 7.331 atau Rp 70,3 juta).

Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo, menilai pemerintah tak memiliki kemauan kuat untuk melunasi hutang. Jika ada niat, Indonesia bisa menjadi negara mandiri.

“Pemerintah tidak memiliki kemauan kuat. Jelas mampu,” kata Arif saat dihubungi merdeka.com.

Secara sumber daya alam dan manusia, Indonesia merupakan negara yang amat kaya. Saking kayanya, grup musik Koes Plus sampai-sampai pernah membuat lagu dengan judul “Kolam Susu”.

Dalam lagu itu salah satu liriknya berbunyi “orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman”. Lirik itu menggambarkan begitu kayanya Indonesia dengan tanah dan sumber daya alam yang dimilikinya. Namun, nyatanya Indonesia malah tak bisa lepas dari hutang.⁷

Sudah begitu, kekejian nekolim tak cukup berhenti di situ.

Saat kebangkrutan terjadi, dan saat kita memperjuangkan *recovery* dari kebangkrutan, sang “tuan” pemberi hutang mensyaratkan berbagai syarat yang notabene merupakan “jebakan” baru (yang tragisnya mereka sendiri tak sadar bahwa persyaratannya telah menghancurkan banyak negara berkembang) yang tadinya hanya “gejala flu” menjadi kanker ganas dan berkepanjangan, dan ini terjadi hampir di seluruh dunia yang terjerat IMF dan bank dunia, sebuah lembaga (yang tampaknya) modern, tapi sesungguhnya melakukan praktik **lintah darat** yang amat keji seperti kelakuan VOC yang kita kutip di atas.

Tipuan Orba mendidik rakyat bahwa “hutang” adalah bantuan, maka hutang sama sekali tak berkonotasi negatif dan bahkan mengandung citra “*altruism*” kepedulian antarbangsa,

⁷ <http://www.merdeka.com/peristiwa/tiap-bayi-lahir-di-indonesia-terbebani-utang-negara-rp-8-juta.html>

terutama negara maju kepada negara berkembang.

Anak bangsa ini juga tak pernah dididik (diberi informasi) yang benar bahwa segala bentuk “bantuan” dari **IMF** dan **Bank Dunia** tadi adalah praktik serigala berbulu domba, metamorfosa dari **VOC** yang berbungkus kolonialisme modern, yaitu neoliberalisme dengan segala tipu muslihatnya seperti kasus **WHO** yang kita kutip di atas yang belakangan ternyata merupakan praktik spionase angkatan laut Amerika yang amat vulgar dan menganggap bodoh bangsa Indonesia, tapi eloknya Presiden ragu dan lebih memilih mengorbankan Menteri Kesehatan (bahkan kehormatan negara dan rakyat) untuk mengalah kepada tekanan Amerika. Mengapa spionase? Cerita ini amat cocok untuk bab kisah NKRI tergadai ini.

NAMRU dan Kejahatan Amerika

Sebenarnya, apa tujuan NAMRU yang “merampok” dengan pinjam tangan WHO di Indonesia? Belakangan, terindikasi NAMRU, laboratorium milik AL AS ini bertanggung jawab atas penyebaran flu burung di Indonesia. Sejauh ini, apa manfaat yang diterima pihak Indonesia dari keberadaan lab yang dikelola angkatan laut Amerika itu sehingga terus dipertahankan?

NAMRU bercokol di Indonesia lebih dari 30 tahun dengan tujuan untuk riset medis dan keilmuan yang berfokus pada penyakit-penyakit tropis. Apakah ini bagian dari strategi Amerika untuk menguasai kawasan jika nanti pecah Perang Pasifik? Jahatnya, basis penelitiannya minta di kompleks Depkes, dan memaksakan agar semua penelitinya mendapat kekebalan diplomatik seolah bangsa kita adalah bangsa yang buta dengan aturan internasional. Apakah ia akan mengulang tragedi Jepang saat kalah Perang Pasifik pada Perang Dunia II akibat banyak tentaranya yang mati oleh nyamuk malaria?

Kita ketahui bersama, *Naval Medical Research Unit No. 2 (NAMRU-2)* adalah lembaga riset biologi Amerika di Indonesia yang bekerja sama dengan Rockefeller Institute Amerika. Mereka memiliki program rahasia yang dinamakan *Viral Diseases Program (VDP)*, program riset yang meneliti epidemiologi virus demam berdarah, influenza, ensefalitis, dan *rickettsioses*. Lembaga tersebut diketuai oleh David Rockefeller.

NAMRU-2 sering dicurigai membawa misi rahasia Amerika, seperti mengembangkan senjata biologi pemusnah massal. Kecurigaan tersebut sangat berdasar mengingat pidato David Rockefeller saat ia berbicara di hadapan Komisi Trilateral Amerika pada bulan Juni tahun 1991 silam. Rockefeller mengatakan:

“Kami berterima kasih kepada harian *Washington Post*, harian *New York Times*, *Time Magazine*, dan media cetak lainnya atas kebijaksanaan mereka mau menepati janji selama hampir empat puluh tahun ini. Kami sendiri tidak mungkin bisa mengembangkan rencana kami untuk dunia jika harus tunduk terhadap peraturan transparansi informasi. Namun, saat ini fasilitas kami lebih canggih dan kami siap untuk mendukung Amerika.”

Laboratorium NAMRU-2 berada di Indonesia sejak 1975 berdasarkan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan AS, 16 Januari 1971. Keberadaannya sendiri bukan tanpa alasan. Ini dikarenakan terjadinya wabah penyakit pes di Boyolali 1968 dan karena pemerintah Indonesia belum mampu menanggulangi wabah tersebut maka pemerintah Indonesia meminta bantuan AS.

Alasan inilah yang perlu kita perdalam lebih jauh. Pertanyaannya adalah kenapa harus Amerika dan NAMRU-2-nya yang kemudian hadir menyelesaikan masalah pes ini? Tentu ini bukan tanpa sebab. Naiknya Soeharto menduduki tampuk

RI-1 memang tidak lepas atas peran besar Amerika. Sebagai pihak yang berjasa besar di balik naiknya Soeharto, Amerika merencanakan segala program untuk mengontrol Indonesia baik dari eksploitasi sumber daya alam seperti Freeport, maupun kesehatan, termasuk NAMRU. Karena itu tidak heran, kita baru mendengar nama NAMRU akhir-akhir ini, karena selama ini kegiatan NAMRU berusaha ditutup rapat-rapat oleh Soeharto dan memiliki otonomi sendiri.

Hal ini terus berlangsung hingga masa pemerintahan SBY.

Siti Fadilah Supari, saat didapuk menjadi *keynote speaker* dalam acara Kajian Zionisme Internasional, 2009 silam mengatakan, sebagai Menkes ia sudah lama mendengar akan diberhentikan oleh SBY. Rencana pemberhentian (atau pencopotan?) dirinya sebagai Menkes sudah berlangsung jauh-jauh hari. Konon, Amerika gerah dengan ulah beliau dalam menguak konspirasi di balik strategi NAMRU-2 menyebarkan virus di Indonesia.

Siti Fadilah Supari secara terang-terangan melarang semua rumah sakit di Indonesia untuk mengirimkan sampel virus flu burung ke NAMRU. Sebab, kontrak kerja sama dengan NAMRU telah berakhir sejak Desember 2005.

Dalam bukunya yang berjudul *Saatnya Dunia Berubah*, Siti Fadilah Supari juga menyoroti WHO dan negara asing lainnya memanfaatkan sampel virus flu burung Indonesia untuk dibuat vaksin, yang selanjutnya dijual ke Indonesia dengan harga mahal.

Pada 16 Oktober 2009, pemerintah secara resmi menghentikan kerja sama dengan NAMRU-2. Penghentian kerja sama ditandai dengan sebuah surat. "Dengan hormat, pemerintah Republik Indonesia menyatakan pemberhentian kerja sama," demikian isi surat Siti Fadilah kepada Duta Besar Amerika Serikat, Cameron Hume.